

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia didirikan dalam landasan yang kukuh berupa landasan konstitusional negara : Pancasila, UUD 1945 dan undang-undang serta peraturan lainnya. Dengan perangkat peraturan perundangan tersebut, Indonesia membentuk sistem politik yang jelas dan terarah sampai pada kehidupan masyarakat daerah sehingga pemerintah dibentuk mulai dari pusat sampai pemerintahan desa<sup>1</sup>.

Dalam dinamisasi sistem politik Indonesia, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, komunikasi politik merupakan salah satu bagian terpenting. Bahkan komunikasi politik dapat menentukan sistem politik yang berkembang dalam pemerintah. Komunikasi politik dapat berubah sesuai dengan perubahan kebijakan termasuk kebijakan yang terkait dengan sistem politik<sup>2</sup>.

Hal itu terjadi, misalnya, dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Semula dipilih oleh pusat (sentralistik) melalui UU No. 5/1974, diubah melalui pemilihan oleh anggota DPRD (perwakilan) melalui UU No. 22/1999 dan diubah lagi menjadi pemilihan langsung oleh rakyat daerah melalui UU No. 32/2004. Perubahan-perubahan landasan berpijak pemerintah daerah, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah juga telah mengubah komunikasi politik yang terjadi di daerah.

---

<sup>1</sup>Hikmat, Mahi M., *Komunikasi Politik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010. hl iv

<sup>2</sup>Ibid., hl iv

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah sangat jelas diatur tentang sosialisasi politik, namun pada tataran implementasi masih saja banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat.

Perlu dipahami terlebih dahulu arti sosialisasi politik sendiri, sosialisasi politik merupakan proses pengenalan sistem politik pada seseorang, kelompok, atau masyarakat, serta respon yang mereka berikan terhadap gejala-gejala politik yang ada dan mereka hadapi. Lebih sederhana lagi, sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat<sup>3</sup>.

Menurut Meriam Budiardjo, partisipasi politik sendiri merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)<sup>4</sup>. Akan sangat erat sekali kaitan partisipasi masyarakat dalam pemilukada, jika sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait maksimal dilakukan.

Sosialisasi politik sendiri dapat meningkatkan respons seseorang atau masyarakat dalam melihat rangsangan dan kehidupan politik. Berkaitan dengan berbagai rangsangan bagi seseorang untuk melakukan partisipasi politik, Weiner mengemukakan lima penyebab (rangsangan) timbulnya gerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Adanya modernisasi di semua bidang yang menyebabkan masyarakat semakin banyak berpartisipasi dalam politik.

---

<sup>3</sup>Gatara, Sahid Dan Dzulkiah Said, Sosiologi Politik, Pustaka Setia, Bandung, 2007. hl 78

<sup>4</sup>Budiardjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hl 367

<sup>5</sup>Suryadi, Budi, *Sosiologi Politik : Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2007, hl 128

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sehingga timbul pertanyaan mengenai siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik yang mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Bila muncul konflik antar elit, yang dicari adalah dukungan rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Hal ini sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Melalui proses sosialisasi politik inilah, menurut Richard E. Dawson dan Kenneth Prewitt, seperti dikutip Ramlan Subakti, anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam lingkungannya. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal dan informal maupun tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi proses sosialisasi dapat juga diperoleh seseorang, baik secara sengaja atau tidak sengaja, melalui transformasi media massa (elektronik maupun cetak)<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widia Sarana, Indonesia, 1992, hl 117

Selama perjalanannya demokrasi langsung, khususnya Pemilukada yang diharapkan menjadi sarana partisipasi politik masyarakat daerah dalam mengedapankan demokrasi sebagai ujung tombak pemerintahan suatu Negara. Ternyata kita dihadapkan pada suatu titik dimana masyarakat belum siap seutuhnya dalam melaksanakan demokrasi ini, sehingga pemahaman politik hanya sebatas memberi suara tanpa tahu *essensi* dari demokrasi itu sendiri, akibatnya pemilu hanya sebatas rutinitas berkala yang semakin ditinggalkan. Hal itu menyebabkan dalam setiap pelaksanaannya angka golput menjadi kandidat kuat pemenang Pemilukada. Di Provinsi Jawa Barat sendiri selama pelaksanaan Pemilukada golput selalu menjadi pemenang bahkan yang terbaru pada pemilukada Gubernur angka golput hampir dua kali lebih banyak dari pada pemenang Pemilukada.

Tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, hal senada juga terjadi di DKI Jakarta dalam pemilihan Gubernur untuk periode 2012-2017, pada putaran pertama angka golput mencapai 36,3% sedangkan pada putaran kedua angka golput mencapai 33,2%<sup>7</sup>. Di Provinsi Banten pun mengalami hal serupa, pada Pemilukada Gubernur tahun 2011 angka golput mencapai 50% dari daftar pemilih tetap<sup>8</sup>. Yang lebih parah terjadi baru-baru ini di Provinsi Sumatera Utara, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Gubernur atau golput mencapai 60%<sup>9</sup>. Dengan demikian dapat dipastikan gubernur terpilih tidak bisa

---

<sup>7</sup><http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/27/14505319/Pilkada.DKI.Putaran.Kedua.Golput.Jakarta.Menurun>

<sup>8</sup><http://www.tempo.co/read/news/2011/10/22/179362777/Megawati-Golput-Banten-di-Atas-50-Persen>

<sup>9</sup><http://www.jpnn.com/read/2013/03/16/162990/Angka-Golput-Tinggi,-Parpol-Semakin-Rugi->

menjadi *representative* masyarakat seutuhnya karena tingkat partisipasi politik masyarakat sangat kecil.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan dan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan<sup>10</sup>.

Pemilukada merupakan suatu bentuk perlawanan dari asas sentralisasi yang sebelumnya Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Akibatnya daerah tidak bisa mengembangkan daerahnya sendiri, karena seluruh kegiatannya sudah terprogram dari pusat. Selain itu juga Pemilukada ini merupakan penegasan terhadap sistem demokrasi langsung. Dengan adanya

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemilukada setiap warga daerah bisa ikut serta berpartisipasi dalam politik, dan dengan pemilukada ini setiap anak daerah bisa mengembangkan daerahnya sendiri, hal ini juga diperkuat dengan adanya otonomi daerah.

Dalam perjalanannya selama 7 tahun Pemilihan Umum Kepala Daerah ini bukan tanpa hambatan, di Provinsi Jawa Barat sendiri pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 partisipasi politik masyarakat Jawa Provinsi Barat terbilang rendah. Angka Golput dalam Pemilihan Gubernur melebihi perolehan masing-masing ketiga pasangan peserta Pilgub bahkan mengalahkan perolehan suara Gubernur Provinsi Jawa Barat terpilih H. Ahmad Heryawan – H. Dede Yusuf (Hade) yang meraih 7.287.647 suara (40,50 persen). Jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 mencapai 9.130.604 suara. Ini jelas membuktikan bahwa partisipasi politik masyarakat Provinsi Jawa Barat jauh dari harapan<sup>11</sup>.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Pengaruh Sosialisasi Pemilukada Kpud Provinsi Jawa Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilgub Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018”.

---

<sup>11</sup><http://www.antaraneews.com>, di Akses pada 23 September 2012, Pukul. 0.55 WIB

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis melihat ada beberapa masalah yang ter-identifikasi:

1. Pemilukada menjadi rutinitas yang semakin ditinggalkan.
2. Jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihna pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2008 mencapai 9.130.604 suara atau 32,6% dari daftar pemilih tetap.
3. Angka golput selalu mengalahkan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Terpilih.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sosialisasi Pemilukada yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimanakah partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bandung dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi KPUD Provinsi Jawa Barat terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sosialisasi KPUD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bandung dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi KPUD Provinsi Jawa Barat terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia politik, khususnya dalam partisipasi politik. Adapun kegunaannya adalah :

- a. Untuk penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang ilmu politik, terutama sebagai pembelajaran dan memberikan informasi mengenai partisipasi politik.



b. Untuk Lembaga

Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang politik yang ada kaitannya dengan masalah upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat.

c. Untuk KPUD Provinsi Jawa Barat

Memberikan masukan kepada KPUD Provinsi Jawa Barat yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat.

2. Dilihat dari segi praktis

Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dari segi praktis, yaitu :

a. Untuk Penulis

Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.

b. Untuk Lembaga

Sebagai bahan pustaka bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama, sehingga dapat mencari alternative pemecahan masalah dengan masalah yang sama.

c. Untuk KPUD Provinsi Jawa Barat

Memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat agar ikut serta dalam partisipasi politik.

## F. Kerangka berpikir

Menurut Michael Rush dan Phillip Althop, sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gerak gejala politik<sup>12</sup>.

Dalam penyampaian pesan politik, sangat diperlukan sarana sebagai suatu penunjang berlangsungnya sosialisasi politik. Sarana penunjang sosialisasi politik tersebut adalah<sup>13</sup> :

1. Keluarga
2. Sekolah
3. Kelompok pertemanan
4. Pekerjaan
5. Media massa
6. Kontak-kontak politik langsung

Dari segi bentuk dan metode penyampaian pesan politik, sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori yaitu<sup>14</sup>:

1. Pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses yang dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma dan simbol politik Negara dari berbagai pihak dalam system politik , seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemilik yang dipandang ideal dan baik.

<sup>12</sup>Damsar, *Pngantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2012. hl 153

<sup>13</sup>Mas'oeed, Mohtar, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008., hal 46-49

<sup>14</sup>Gatara, Sahid dan Dzulkiah Said. Op. cit., hl 79-80

## 2. Indoktrinasi politik

Indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap mereka sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin.

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum<sup>15</sup>.

Bentuk dan hierarki partisipasi politik itu sendiri dalam kerangka konsep Rush dan Althoff, secara berturut-turut adalah<sup>16</sup> :

1. Voting (pemberian suara)
2. Ikut serta dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik,
3. Partisipasi dalam rapat umum,
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political)
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political)
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
7. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
8. Mencari jabatan politik atau administrasi
9. Menjabat jabatan politik atau administrasi

---

<sup>15</sup>Damsar, Op. Cit., hl 180

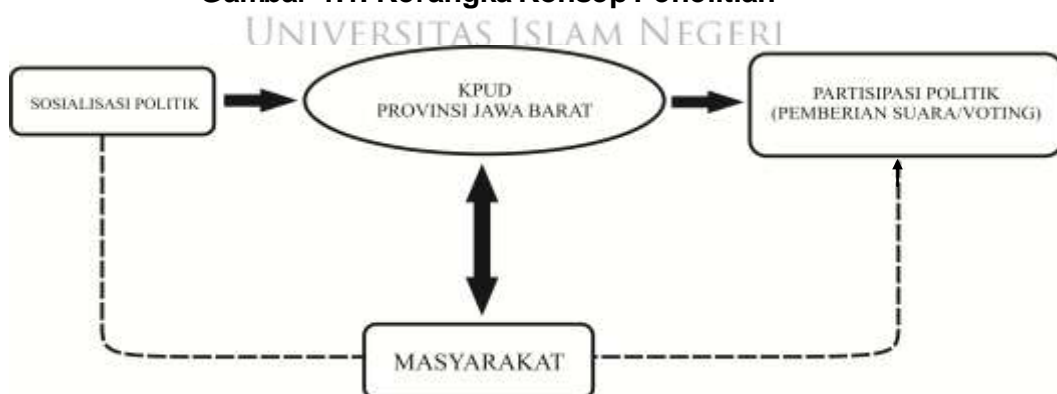
<sup>16</sup>Rush dan Phillip Althop, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2011., hal 121

Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengajukan dua kriteria penjelas.

1. Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga Negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
2. Intensitas, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau yang rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis partai politik, pejabat partai politik, kelompok penekan. Jadi, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi”.

**Gambar 1.1. Kerangka Konsep Penelitian**



## G. Hipotesis

Hipotesis menurut Suharsimi Arikunto adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti baik problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian<sup>17</sup>. Dengan kedudukannya itu maka hipotesis dapat berubah menjadi kebenaran, akan tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran.

Hal senada juga dikemukakan Sugiyono yang mengatakan bahwa<sup>18</sup> : “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah Hipotesis korelasional. Hipotesis korelasional adalah hipotesis yang berisi pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel<sup>19</sup>. Jika pola hubungan antara dua atau lebih variabel bersifat kausal (sebab-akibat). Atas dasar kerangka berfikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis korelasional, yaitu : “Besarnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dipengaruhi oleh Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat”.

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta. 2006., hl 71

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2011., hl 70

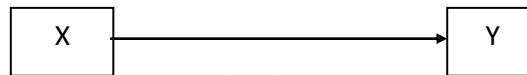
<sup>19</sup><http://arimjie.blogspot.com/2012/05/jenis-jenis-hipotesis.html>, di Akses pada 1 Oktober 2012, Pukul 21.04

Sedangkan hipotesis operasionalnya adalah sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y

Dengan demikian, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Paradigma penelitian tersebut menggambarkan bahwa variabel X dapat mempengaruhi variabel Y, sehingga apabila variabel X ditingkatkan maka variabel Y pun ikut meningkat, begitupun sebaliknya.